

ANALISIS PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP PENILAIAN KINERJA BUD PADA BPPKAD KABUPATEN PONOROGO

Moch Faridha Anshori ¹⁾

Y. Djoko Suseno ²⁾

Suprihatmi Sri Wardiningsih ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Magister Manajemen Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ fariddppkad@gmail.com

ABSTRACT

The results of the calculations showed that multiple linear regression using the t test showed that the performance-based budgeting system had a significant significant effect on the performance of BPPKAD Ponorogo District office employees, so that hypothesis 1, which reads Performance Based Budgeting System, had a significant effect on the performance of BPPKAD employees. Multiple linear regression using the t test shows that the Financial Accounting system has a significant effect on the performance of BPPKAD Ponorogo Regency employees, so that hypothesis 2 that reads the Financial Accounting System has a significant effect on the performance of the Ponorogo Regency BPPKAD office staff, is proven to be true. Multiple linear regression using the t test shows the influence of financial management information systems on the performance of BPPKAD Ponorogo Regency employees statistically significant, so that hypothesis 3 is proven to be true.

Keywords: *Performance Based Budgeting, Regional Financial Accounting, Systems Financial Management Information Systems, Performance Appraisal*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik setiap tahun melakukan penyusunan anggaran. Untuk mengatur kegiatan perekonomian daerah, maka suatu daerah harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu amanat rakyat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam satu tahun. finansial tertentu yang dinyatakan dalam mata uang. Perwujudan amanat rakyat di sisi pemerintah daerah ini dinyatakan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, dengan demikian penyusunan anggaran pemerintah daerah yang berprestasi pada kepentingan masyarakat publik (Bastian, 2011: 16).

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam organisasi. Pada organisasi privat atau swasta. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik dan diberi masukan dalam

rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Penyusunan APBD berbasis prestasi atau kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, Standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal (Sem, 2012: 156).

Menurut Sem (2012) Tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini di kota Dumai menunjukkan bahwa telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran disetiap SKPD yang ada. Sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolalan daerah juga berpengaruh terhadap penilaian SKPD kota Dumai.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah (PP No 58 tahun 2005) Dalam struktur pemerintah daerah, satuan kerja merupakan identitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Sistem akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Menteri Keuangan menetapkan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP No 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Menurut Silalahi (2012: 78) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap peningkatan kinerja baik merupakan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal juga dengan sebutan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) merupakan sistem yang terdiri dari bermacam-macam program. Penyusunan Penganggaran (APBD). Penatausahaan Keuangan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 No tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut (Paulus Sillahi, Sem 2012: 57) bahwa suatu Sistem Informasi Pengelolalan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD Kota Dumai.

Performance Appraisal (Penilaian Kinerja) Adalah suatu kegiatan (*input-proses-output*) yang dikenal dengan pendekatan individual, di mana menekankan pada pengukuran atau penilaian ciri-ciri kepribadian pegawai dari pada hasil (prestasi) kerjanya. Indikator kepribadian yang menjadi objek pengukuran yaitu: Kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, kreativitas, adaptasi, komitmen, motivasi (kemauan) dan sopan santun.

Penilaian kinerja Sofyandi (2011: 122) menyatakan bahwa penilaian kinerja (*performance Appraisal*) adalah proses organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja pegawai. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai pegawai dengan standar pekerjaan. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi pegawai kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Penilaian kinerja pegawai

memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar kinerja serta memotivasi pegawai pada waktu berikutnya. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Penilaian kinerja yang baik dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja pegawai.

Penilain, Sem (2012: 35) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kinerja perangkat daerah. Penelitian ini mengambil ini mengambil sampel di kota Dumai menunjukkan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD. Pemerintah Dumai telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran disetiap SKPD yang ada. Sistem akuntansi, sistem informasi berpengaruh terhadap penilaian SKPD kota Dumai tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian Rico (2014: 134) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan *good government* terhadap penilaian kinerja perangkat daerah. Penelitian ini mengambil sampel di Kabupaten Indragiri Hulu, menunjukkan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD Dengan demikian semakin tinggi tingkat implementasi/penerapan. Anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula implementasi penilaian kinerja SKPD yang dimiliki. Sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis signifikansi pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap penilaian kinerja BUD pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisis signifikansi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penilaian kinerja BUD pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo.
3. Menganalisis signifikansi pengaruh sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja BUD Pada kantor BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja.

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggung jawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggung jawaban kinerja pemerintahan (Halim, 2009) Berdasarkan pernyataan di atas maka perumusan hipotesis pertama penelitian:

H1. Sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja BUD pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi pengeluarannya mengadopsi dari Silalhi (2012)

dengan pengukuran skala likers 5 (lima) point dan sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Berdasarkan pernyataan di atas maka perumusan hipotesis penelitian adalah

H2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penilaian kinerja BUD pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo

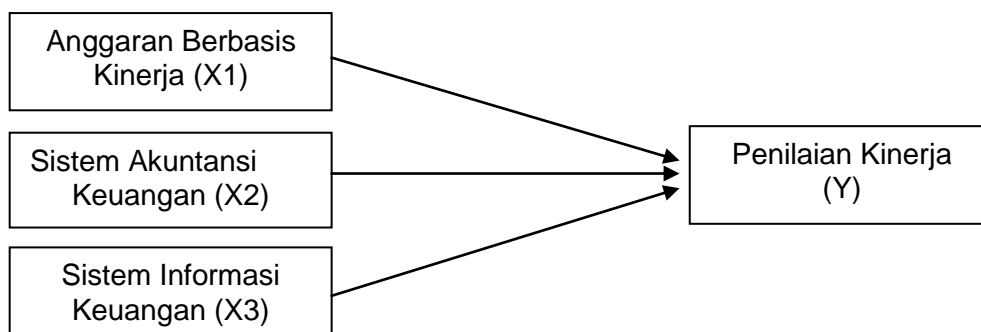
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem di definisikan Mulyono (2009) Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih, sedangkan menurut McLoad dan Schell (2008) Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi menurut Wikinson (2005) merupakan komoditas vital sebuah organisasi atau perubahan yang terdiri dari data yang telah ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisien dalam penghimpunan dua keuangan daerah. Variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan pengukuran skala Likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Berdasarkan pernyataan di atas maka perumusan hipotesis ketiga penelitian adalah:

H3. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja BUD pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

Kerangka Pemikiran

Rancangan kerangka berpikir sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Berdasarkan skema kerangka pemikiran teoritis penelitian pada gambar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dalam penelitian ini variabel bebas terdiri dari anggaran berbasis kinerja (X1), Sistem Akuntansi Keuangan (X2), Sistem Informasi Keuangan (X3).

Variabel terikat adalah variabel Penilaian Kinerja (Y).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah di BPPKAD (Badan Pendataan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Kabupaten Ponorogo. Jenis data adalah 1) data kualitatif 2) data kuantitatif.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkannya (Sugiyono, 2008: 80) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pada Bendahara SKPD se Kabupaten Ponorogo berjumlah 40 Pegawai (1) Pegawai SKPD pemerintah daerah, (2) Pegawai berkaitan pengelolaan keuangan (3) yang bersedia menjadi responden di Kabupaten Ponorogo.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Arikunto (2010: 112) apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. tetapi jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10-15 % atau 15 - 25% atau lebih. Dari keseluruhan populasi semuanya berjumlah 58 Orang maka sesuai pendapat tersebut jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diambil 58 orang sebagai sampel.

Definisi Operasional variabel, Indikator dan Pengukuran Variabel

1. Implementasi Anggaran berbasis Kinerja.

Anggaran berbasis kinerja merupakan proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintah yang lebih baik. Menurut Silalahi et, all (2014) Penganggaran berbasis kinerja yang baik dengan dimensi sebagai berikut:

- Anggaran dengan standar SOP.
- Anggaran tujuan penggunaan dan pengendalian
- Anggaran merupakan rencana keuangan
- Anggaran dan penggunaan dengan prioritas dana.
- Penganggaran bertanggung jawab kepada publik
- Penganggaran berbasis kinerja
- Penganggaran berdasarkan proses melalui standar harga
- Penganggaran melalui standar pelayanan minimal

Dengan pengukuran skala Likert 5 (lima) poin dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

2. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan merupakan prosedur yang terus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi pengeluarannya mengadopsi dari Kotler dalam Silalahi dan Ales, et,. Al (2014) dalam penelitian menemukan dimensi sebagai berikut:

- Alternatif akuntansi manajemen, keuangan, pemerintahan,
- Akuntansi informasi bersifat keuangan
- Laporan informasi keangan dengan laporan keuangan
- Informasi akuntansi keuangan daerah
- Akuntansi keuangan dipakai Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan pengukuran skala Likert 5 (point) dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Sistem informasi menurut Mulyono (2010: 28) adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan. Informasi. Menurut Wikinson (2010) merupakan komoditas vital bagi sebuah organisasi atau perubahan, yang terdiri dari data yang telah ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan. Menurut Silalahi (2012) menemukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sistem informasi dari program penyusunan anggaran,
- Sistem informasi dari teknologi mengolah data
- Informasi yang berkualitas relevan, akurat dan tepat waktu
- Sistem informasi keuangan yang strategis
- Sistem informasi keuangan yang terintegrasi
- Sistem informasi keuangan bagi organisasi
- Sistem keuangan dari data-data ditransformasikan
- Sistem informasi berpengaruh terhadap penilaian kinerja.

Variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dengan pengukuran skala Likert 5 (lima) point sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

4. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja menurut Simamora (2010: 50) adalah tingkat hasil kerja karyawan baik segi kualitas maupun berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Dalam menentukan penilaian kinerja karyawan maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian kinerja Ardy dan Rico (2014: 69) sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan memberikan rasa kebanggaan.
- Pegawai termotivasi bekerja mampu memberikan yang terbaik
- Pegawai senang apabila pekerjaan mendapatkan pujian.
- Termotivasi bekerja karena mendapat gaji yang memadai.
- Selalu menjalankan tugas sesuai dengan standart kerja
- Memanfaatkan waktu kerja dengan sebaik-baiknya,
- Banyak belajar mengenai isu-isu lingkungan.
- Puas terhadap promosi dan kenaikan jabatan
- Mempunyai hubungan kerjasama dengan rekan sekerja.
- Puas terhadap pimpinan yang dapat memberikan teladan baik.

Variabel terikat: Penilaian kinerja dalam lembaga tersebut dengan pengukuran skala Likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa sermat suatu tes (alat ukur) melakukan fungsi ukurnya. Cara menguji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor totalnya. Untuk mengetahui nilai validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai *corrected item-total correlation* (r), kemudian nilai ini dikonsultasikan dengan nilai r tabel yaitu 0,3 (2011:152) Jika koefisien validitas $p\ value < 0,05$ maka pernyataan tersebut valid, tetapi jika koefisien validitas $p\ value > 0,05$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas.

Dalam penelitian setelah dapat diketahui item-item kuesioner yang valid, maka item-item yang valid tersebut diuji reliabilitasnya. Menurut reliabilitas adalah ketepatan suatu instrument apabila diberikan kepada subyek yang sama. Pengujian reliabilitas kuesioner dapat dilakukan dengan rumus *Alpha Cronbach* dan dapat diketahui dari besarnya nilai alpha dalam *output* SPSS versi 20 for windows. Menurut Ghazali (2011: 67) kriteria uji reliabilitas adalah suatu konstruk variabel dikatakan baik atau *reliable* jika memiliki nilai *Cronbach,s Alpha* $> 0,60$

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Data yang digunakan sebagai model regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian tersebut uji asumsi klasik yang dilakukan adalah:

a. Uji Multikolinearitas

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikonieritas di dalam regresi dapat diketahui dengan melihat *variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* dimana jika nilai VIF < 10 dan *tolerance* < 1 maka model regresi bebas *multikolonieritas*. Batas VIF digunakan untuk menyimpulkan apakah terjadi *multikolonieritas* atau tidak batasnya adalah 10 dan batas *tolerance* mendekati angka 1. Apakah hasil analisis menunjukkan nilai VIF dibawah 10 dan mendekati 1, maka dapat disimpulkan tidak terjadi *multikolonieritas*.

b. Uji Autokorelasi

Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin- Watson*. Jika angka *Durbin Waston* di bawah -2 berarti ada *autokorelasi positif* sedangkan di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada korelasi. Jika di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi hetroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengujiada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hasil pengujian menggunakan uji *Glesjser* dengan tingkat kepercayaan 5%, apabila *p-value* > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi normal atau tidak. Hasil pengujian akan dibandingkan dengan nilai signifikan 5% atau 0,05 menggunakan uji *Kolmogorrov Smirnov*, dengan melihat *p- value* > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal, sedangkan *p value* > 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi normal

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel independen. Rumus matematis dari regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan

Y = Penilaian kinerja

a = Konstanta

b₁,b₂,b₃ = Koefisien variabel

X₁ = Peran Anggaran Berbasis Kinerja

X₂ = Peran Sistem Akuntansi keuangan Daerah

X₃ = Peran Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

e = *error*

3. Uji t (Uji Koefisien Regresi Parsial)

Nilai t menunjukkan pengujian variabel-variabel independen secara individu, yang dilakukan untuk melihat apakah variabel dependen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen dengan mengasumsikan variabel lainnya tetap konsisten dari uji t untuk menguji keberartian koefisien regresi parsial, artinya variabel merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

4. Uji F (Uji Ketepatan Model)

Uji F menunjukkan bahwa pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan serentak. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui Apakah variabel bebas secara serentak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai model determinasi adalah antara nol hingga satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Responden

Berdasarkan penelitian hal ini, responden berjumlah 58 orang. Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	15	25,86
	Perempuan	43	74,14
	Jumlah	58	100
Usia	41-45	21	36,21
	36-40	30	51,72
	31-35	2	3,45
	26-30	5	8,62
	Jumlah	58	100
Pendidikan	SMA/Sederajat	18	31,03
	D3/Sederajat	10	17,24
	Sarjana (S1)	25	43,1
	Sarjana (S2)	5	8,62
	Jumlah	58	100
Bidang	Kelurahan	12	20,69
	Kesehatan	14	24,14
	Dinas	18	31,03
	Kecamatan	14	24,14
	Jumlah	58	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

2. Hasil Uji Instrumen

Hasil uji validitas instrumen disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
	No. Item	<i>p-value</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sistem	1	0,000	Valid	0,735	Reliabel
Anggaran	2	0,000	Valid		
berbasis	3	0,000	Valid		
Kinerja	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		
	7	0,000	Valid		
	8	0,000	Valid		
Sistem	1	0,000	Valid	0,725	Reliabel
Akuntansi	2	0,000	Valid		
Keuangan	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		
Informasi	1	0,000	Valid	0,739	Reliabel
Pengelolaan	2	0,000	Valid		
Keuangan	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		
	7	0,000	Valid		
	8	0,000	Valid		
Kinerja	1	0,000	Valid	0,812	Reliabel
Pegawai	2	0,000	Valid		
Keuangan	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		
	7	0,000	Valid		
	8	0,000	Valid		
	9	0,000	Valid		
	10	0,000	Valid		
	11	0,000	Valid		

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Hasil uji validitas variabel sistem anggaran berbasis kinerja sebanyak 8 item kuesioner dinyatakan valid karena *p-value* < 0,05, Sistem Akuntansi Keuangan sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena *p-value* < 0,05 Informasi Pengelolaan Keuangan sebanyak 8 item kuesioner dinyatakan valid karena *p-value* < 0,05 dan Kinerja Pegawai Keuangan sebanyak 11 item kuesioner dinyatakan valid karena *p-value* < 0,05

Hasil uji reliabilitas variabel sistem anggaran berbasis Kinerja sebesar 0,735, Sistem Akuntansi Keuangan sebesar 0,725, Informasi Pengelolaan Keuangan sebesar 0,739 dan Kinerja Pegawai Keuangan sebesar 0,812, hal ini semua menunjukkan nilai reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* > 0,060.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinieritas	Tolerance (0,950, 0,886, 0,883) > 0,10 VIF (1,053, 1,128, 1,132) < 10	Tidak terjadi multikolinieritas
Uji autokorelasi	P:(0, 421)	Tidak terjadi autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	P: (0,958; 0,482; 0,047; 0,422) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	P: (0,401) > 0,05	Residual terdistribusi normal

Sumber: Data primer diolah, 2019

4. Hasil Uji Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig
	B	Std Error	Betta		
(Constant)	49,571	11,949		4,149	0,000
SAB Kinerja	0,052	0,157	0,046	0,331	0,742
SAK	0,181	0,204	0,126	0,877	0,379
SIPKD	0,105	0,191	0,078	0,549	0,585
F	0,547				0,002
Adj R ²	0,029				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 49,571 + 0,052 X_1 + 0,181 X_2 + 0,105 X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diimplementasikan sebagai berikut:

a = 49,571 artinya apabila sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan dan sistem informasi pengelolaan keuangan tidak sama dengan 0 maka kinerja pegawai adalah negatif

$b_1 = 0,052$ artinya sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Apabila sistem anggaran berbasis kinerja semakin ditingkatkan, maka kinerja pegawai semakin ditingkatkan, maka kinerja pegawai semakin meningkat dengan asumsi variabel sistem akuntansi keuangan dan sistem Informasi keuangan daerah dianggap konstan.

$b_2 = 0,181$ artinya sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja pegawai. Apabila sistem informasi pengelolaan dan sistem anggaran berbasis kinerja semakin ditingkatkan maka kinerja pegawai semakin meningkat dengan asumsi variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja dianggap konstan.

$b_3 = 0,105$ artinya sistem informasi pengelolaan keuangan berpengaruh berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Apabila sistem sistem anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan semakin ditingkatkan maka kinerja pegawai meningkat dengan asumsi variabel sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah dianggap konstan.

5. Hasil Uji t

Langkah-langkah uji t dan masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Uji pengaruh Sistem Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pegawai

Hasil uji t pengaruh sistem anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai seperti dijelaskan pada tabel 4 menghasilkan t hitung sebesar 0,331 dengan nilai probabilitas $(0,000) < 0,05$ H_0 ditolak atau H_a diterima berarti terdapat pengaruh signifikan sistem anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian hipotesis dapat diterima atau terbukti kebenarannya.

b. Uji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai.

Hasil uji t pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja pegawai pegawai seperti dijelaskan pada tabel 4 menghasilkan t hitung sebesar 0,887 dengan nilai probabilitas $(0,000) < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja pegawai BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian hipotesis dapat diterima atau terbukti kebenarannya.

c. Uji pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan keuangan terhadap Kinerja pegawai.

Hasil uji t pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pegawai dijelaskan pada tabel 4 menghasilkan t hitung sebesar 0,549 dengan nilai probabilitas $(0,000) < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan sistem informasi pengalolaan keuangan terhadap kinerja pegawai kantor BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian hipotesis dapat diterima atau terbukti kebenarannya.

6. Hasil Uji F

Berdasarkan tabel 4, dilihat bahwa kelayakan uji F dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh sistem anggaran berbasis kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Informasi keuangan daerah terhadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dari F hitung sebesar 0,547 dengan dengan nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari 0,05

PEMBAHASAN

Studi ini mengembangkan dan menyebabkan pola pengaruh sistem anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan, sistem informasi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pegawai yang terkait dengan teori manajemen sumber daya manusia.

Temuan pada pengembangan model secara integratif memberikan implikasi teori tentang sistem anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai kantor BPPKAD Kabupaten Ponorogo menggunakan analisis regresi linear berganda.

Beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu berhasil di temukan konfirmasikan, sisten anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan dan sistem informasi Pengelolaan keuangan perlu mendapatkan perhatian lebih besar mengingat ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Selain hal-hal tersebut sebagai upaya meminimalisir terjadinya kurang pengawasan kerja, hal-hal positif yang bisa dilanjutkan bahkan dikembangkan:

1. Meningkatkan informasi dan koordinasi yang efektif secara vertikal maupun horisontal.
2. Meningkatkan efektifitas kerja yang tercantum dalam SOP sehingga semakin mampu melakukan tugas poko dan fungsi manajemen di kantor BPPKAD Kabupaten Ponorogo.
3. Meningkatkan fungsi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang secara periodik.

PENUTUP

Hasil perhitngan menunjukkan bahwa regresi linear berganda dengan menggunakan uji t menunjukkan sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor BPPKAD Kabupaten Ponorogo., sehingga hipotesis 1 yang berbunyi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai BPPKAD, terbukti kebenarannya. Regresi linear berganda dengan menggunakan uji t menunjukkan sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai BPPKAD Kabupaten Ponorogo, sehingga hipotesis 2 yang berbunyi Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh kinerja berpenga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor BPPKAD Kabupaten Ponorogo, terbukti kebenarannya. Rregresi linear berganda dengan menggunakan uji t menunjukkan pengaruh sistem informasi pengelolaam keuangan terhadap kinerja pegawai kantor BPPKAD Kabupaten Ponorogo secura statistik signifikan, sehingga hipotesis 3 terbukti kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta
- Arsdy, 2013. Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah salah satu Faktor yang berpengaruh terhadap Penilaian Kinerja BUD di BPPKAD Kabupaten Ponorogo.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah. 2011. Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Fokus Media Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 55 tahun 2006 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pembantu SKPD serta penyampiannya.
- Friska, Indriani Yulia, 2012. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntanbilitas kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)". *Jurnal akuntansi*.

- Ghozali, Imam 2013 *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, 21 Update PLS Regresi* Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Haspiarti 2012, "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan". *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol 2, No 2.
- Justliana, 2013 Evaluasi Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah pada Kabupaten Konawa Utara.
- Mardiasmo, 2009 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi. Yogyakarta.
- McLeod Jr, George Schell, 2007. *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nugroho Fauzy, Ardy, 2013. "Pengaruh Pengawasan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Se Eks Karesidenan Surakarta)". *Jurnal Akuntansi*.
- Paulus Silalahi, Sem. 2012. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Sistem Akuntansi Keuangan daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian SKPD, Studi Pemerintahan di Kota Dumai." *Jurnal Akuntansi* Vol 20 No 3.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ramandai P. 2010. "Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah" *Jurnal Maksi* Volume No 10: 55-73 Universitas Diponegoro Semarang.
- Rico Kennedy dan Rheny, 2014 "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Good Government terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Ekonomi* Vol 1 No 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pernama Dhika. 2013. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta [Http://eprints.ac.id/eprint/17827](http://eprints.ac.id/eprint/17827), 10 Mei 2016.
- Priansyah Dedii, Lewi Malisan, dan Risma Dwi Deviyani. 2012. Analisis Penatausahaan Anggaran Belanja pada Badan Koordinasi Keliarga Berencana Nasional Propinsi Kalimantan Timur, *Jurnal* Vol 1 No, 1 <http://portalgaruda.org>. 10 Mei 2016
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.